

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TENGAH
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DITINJAU
DARI INDEKS KEPARAHAN DAN KEDALAMAN
KEMISKINAN**

SKRIPSI

OLEH:

**SRI APRILIA DEWI
178510021**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TENGAH
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DITINJAU
DARI INDEKS KEPARAHAN DAN KEDALAMAN
KEMISKINAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area



OLEH

SRI APRILIA DEWI

178510021

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah Dalam Upaya
Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan Dan
Kedalaman Kemiskinan

Nama : Sri Aprilia Dewi

NPM : 178510021

Proram Studi : Ilmu Pemerintahan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Evi Yunita Kurniati, S.Sos, M.IP

Mengetahui :

Ka.Prodi Ilmu Pemerintahan,



Dr. Siti Juliana Hasibuan, M.Si

Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh melalui sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Oktober 2022



Sri Aprilia Dewi
178510025



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area , saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Aprilia Dewi
NPM : 178510021
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

- Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan Dan Kedalaman Kemiskinan ", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan hak bebas royalti noneksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 17 Oktober 2022



ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DITINJAU DARI INDEKS KEPARAHAN DAN KEDALAMAN KEMISKINAN

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga yang lazim digunakan untuk mengukur kesejahteraan dalam wilayah tersebut, Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi,serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya banyak program atau upaya pemerintah telah dilakukan untuk memenuhi hak-hak sosial masyarakat miskin. Namun, kenyataannya program tersebut belum terlaksana dengan baik dan terealisasi secara merata. Pemerintah Daerah dan dalam pemberdayaan masyarakat miskin seyogyanya lebih intens koordinasi dengan dinas-dinas terkait, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

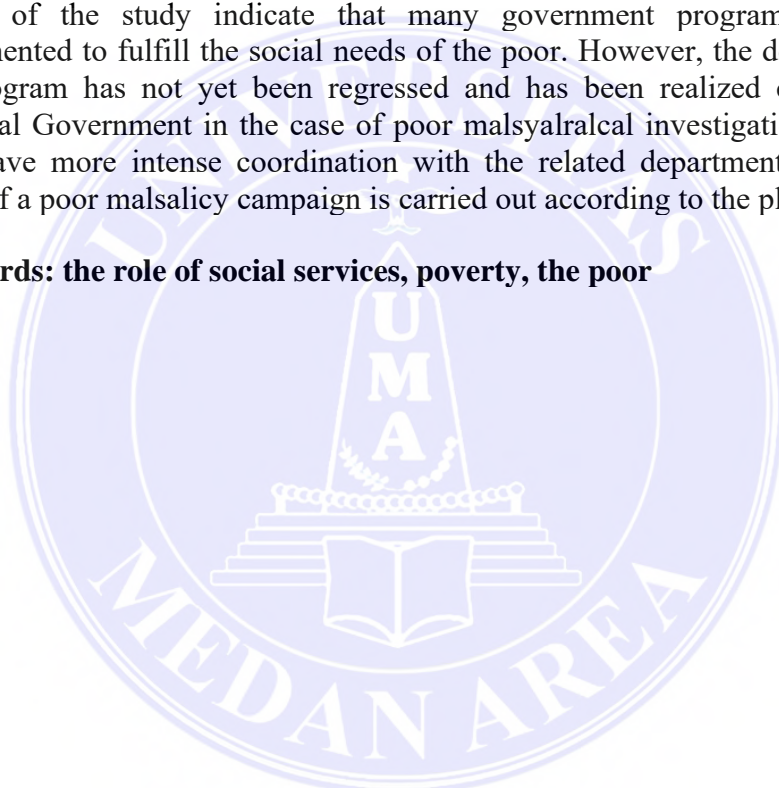
Kata kunci : peran dinas sosial, kemiskinan, masyarakat miskin

ABSTRACT

THE ROLE OF THE SOCIAL SERVICES OF CENTRAL ACEH REGENCY IN POVERTY REDUCTION EFFORTS FROM THE INDEX SEVERITY AND DEPTH OF POVERTY

Poverty is one of the most important measures to determine the level of welfare of a household which is commonly used to measure welfare in the region. The purpose of this study is to find out what the role of the Central Aceh District Social Service is in poverty alleviation efforts. This research method uses qualitative techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that many government programs have been implemented to fulfill the social needs of the poor. However, the development of the program has not yet been regressed and has been realized partially. The Regional Government in the case of poor malnutrition investigations should, in fact, have more intense coordination with the related departments, so that the event of a poor malnutrition campaign is carried out according to the plan.

Keywords: the role of social services, poverty, the poor



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang di pilih dalam penelitian ini ialah peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya pengetasan kemiskinan di tinjau dari indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan.

Untuk sampai pada tahapan ini, banyak sekali suka dan duka yang penulis rasakan. Demikian pula, telah banyak bantuan baik materi maupun sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang penulis terima. Oleh karena itu, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran illahi robbul Izazati, Allah SWT dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasi dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc selaku penanggung jawab penuh terhadap peroses belajar mengajar di lingkungan UMA.
2. Dekan Fakultas ilmu sosil dan ilmu politik Univeritas Medan Area, Bapak Heri Kusmanto. MA selaku penanggung jawab di lingkungan fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik.
3. Ketua Jurusan Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP yang telah memberikan persetujuan awal pada skripsi ini.
4. Pembimbing 1 Walid Mustafa, S.Sos, M.IP yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat, mengarahkan dan membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini.

5. Pembimbing 2 Evi Yunita Kurniaty,S.Sos,M.IP yang dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sekretaris saya bapak Fuad Putera Ginting S.Sos.M.Ip yang telah membantu dan memberikan ilmunya kepada saya untuk membuat skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Seluruh Dosen Fakultas Isipol yang selama ini telah menjadi dosen yang sabar dalam mendidik mahasiswanya di bangku kuliah serta segenap karyawan yang telah membantu menyelesaikan seluruh administrasi.
8. Kedua Orang Tua Bapak Akmal Baluntara, Ibu Salminar dan Suami saya tercinta Khairul Rizal beserta Teman-teman Jurusan ilmu pemerintahan Angkatan 2017. Tri maya sari, gustina rahmayunu , Isra hayati, Riski ramadan rambe, Ulfa maharani, Nur azizah, Isak pandingangan, Ummi khoiria, Beri ginting, Dian lubis, Markus marbun, Iwan nainggolan, Dosma sijabat, Ayu situmeang, Afti anju bintang sinurat, Hotlas teguh pane Semoga sukses dan tidak lupa satu sama lain.
9. Teman serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam meyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT.Amin. Penulis menyadari ada banyak kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karenanya kritik dan saran yang sangat membangun penulis harapkan sebagai pemelajaran untuk mencapai yang lebih baik di masa depan.

Penulis

(Sri Aprilia Dewi)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	Error! Bookmark not defined.
KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
2.1. Pengertian Peran	8
2.2. Pengertian Dinas Sosial	10
2.3. Kemiskinan	11
2.3.1. Pengertian Kemiskinan	11
2.3.2. Karakteristik kemiskinan	14
2.3.3. Pengentasan Kemiskinan	16
2.4. Penelitian terdahulu	17
2.5. Kerangka Berfikir	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1. Jenis Penelitian, Sifat Penelitian dan Lokasi Penelitian	22
3.1.1. Jenis Penelitian	22
3.1.2. Sifat Penelitian.....	22
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	23
3.2. Informan Penelitian.....	23
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4. Metode Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.1.1. letak Geografis Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah	30
4.1.2. Pendidikan	32
4.1.3. Pariwisata, adat, dan budaya	32
4.1.4. Pertanian dan perkebunan	33
4.1.5. Demografi	34
4.1.6. Sejarah Dinas sosial Kabupaten Aceh Tengah	34
4.1.7. Struktur Organisasi	35
4.1.8. Struktur Dinas sosial Kabupaten Aceh Tengah	38
4.1.9. Visi dan Misi Dinas sosial Kabupaten Aceh Tengah.....	40
4.2. Hasil Penelitian	42
4.2.1. Data Terkait Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah Sesuai Dengan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan.....	42
4.2.2. Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahannya Dan Kedalaman Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah	48
KEPALA DINAS SOSIAL.....	58
4.2.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dinas Sosial Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah.....	63
BAB V PENUTUP	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	21
Gambar 4. 1 Struktur Dinas sosial Kabupaten Aceh Tengah	39



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persentase Kemiskinan Aceh Tengah.....	5
Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	18
Tabel 4. 1 Daftar Nama Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah.....	30
Tabel 4. 2 Batas Wilayah.....	32
Tabel 4. 3 Kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014-2017.....	44
Tabel 4. 4 Perbandingan NTP Provinsi Aceh Dan Nasional Tahun 2014-2019.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah lama menjadi masalah klasik yang tidak kunjung selesai, berbagai kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Karena di satu sisi menentukan tingkat perkembangan suatu masyarakat dan di sisi lain menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya proses pembangunan, kemudian untuk program pengentasan kemiskinan tetaplah menjadi salah satu program prioritas dan strategi lintas bidang di Indonesia. (Janambani, 2018, hal. 1) Untuk itu karakteristik program Bantuan sangatlah penting diberikan oleh Pemerintah guna untuk mengetaskan kemiskinan salah satunya seperti bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga adalah pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Program ini mencakup Raskin, Bea Siswa Sekolah Mandiri, Program Keluarga Harapan, Program Program Berbasis Pemberdayaan dan dan Jamkesmas didesign dengan menggunakan pendekatan partisipatif, mendorong penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro kecil. Karakteristiknya adalah bantuan modal skala mikro, penguatan kemandirian dan akses pasar, dan peningkatan keterampilan serta

manajemen usaha penerima manfaatnya adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil, dan juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.(janambani, 2018, hal. 2)

Sementara bagi Indonesia persoalan kemiskinan menjadi satu persoalan tersendiri yang dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor kehidupan. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa, pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. (Arifin, 2013, hal. 2).

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Arifin, 2013).

Pada dekade 1990-an pemerintah memunculkan kembali program pengentasan kemiskinan, diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra). Adanya program-program tersebut dan program pembangunan lainnya secara perlahan-lahan mampu menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi dengan timbulnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, telah menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Akibat krisis ekonomi yang terus berkelanjutan, sampai dengan akhir tahun 1998 jumlah penduduk miskin telah menjadi 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah penduduk Indonesia. Perlu dicatat bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak sepenuhnya terjadi akibat krisis ekonomi, tetapi juga dikarenakan perubahan standar yang digunakan (BPS, 2003:575). Jumlah penduduk yang meningkat tersebut terutama disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Dalam kondisi krisis, kenaikan harga-harga yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan nominal menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas sehingga penduduk yang semula tidak termasuk miskin menjadi miskin.

Timbulnya krisis ekonomi tersebut, maka pemerintah melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk. Aktivitas program ini: 1) Program keamanan pangan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk keluarga miskin; 2) Program pendidikan 5 dan perlindungan sosial; 3) Program kesehatan melalui aktivitas memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin; 4) Program padat karya untuk

mempertahankan daya beli rumah tangga miskin. Upaya tersebut dilanjutkan dengan meluncurkan program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM/DKE) pada akhir tahun 1998 berupa pemberian dana langsung kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. (Arifin, 2013, hal. 5)

Dengan melihat penjelasan diatas dan judul mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam pengentasan kemiskinan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan. Muncul suatu permasalahan mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam pengentasan kemiskinan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan.

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu Kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan bukit barisan yang membentang sepanjang pulau Sumatra. Sampai pada saat ini banyak kebijakan yang telah dibuat pemerintah untuk mengentas kemiskinan, berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk meminimalisir kemiskinan tersebut, Seperti Aceh Tengah sendiri banyak kegiatan dan kebijakan yang telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan.

Berbagai Kegiatan untuk meningkatkan peran Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial, pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga memiliki wawasan dan penunjang dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata masih kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari jumlah data kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah dilihat dari tahun 2014-2017 dimana dilihat dari kemiskinan di Aceh Tengah setiap tahunnya

meningkat. Berikut ini tabel yang menunjukkan persentase kemiskinan di Aceh Tengah pada tahun 2014-2017.

Tabel 1. 1 Persentase Kemiskinan Aceh Tengah

No	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh Tengah	16,99	17,51	16,64	16,76	15,58	15,50

Sumber: BPS Aceh Tengah

Berdasarkan penelitian diawal yang saya amati ada beberapa masalah dalam pengentasan kemiskinan di Aceh Tengah dilihat dari peran dari para pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan begitu juga dengan kebijakan dan pengimplementasiannya yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dan dikarenakan juga ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan dalam pengentasan kemiskinan tersebut.

Alasan mengapa saya mengangkat judul ini karena menurut saya dalam pengentasan kemiskinan di Aceh Tengah belum baik karena kurangnya peran aktif dan penyelesaian kendala dari pemerintahan terkhusus dinas sosial yang turut sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut Husaini dan Purnomo (2017:57) tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam pengentasan kemiskinan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1), dan menjadi bahan masukan secara langsung bagian perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya Mengenai Peran Dinas Sosial dalam Pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti maupun para pembacanya, dan dapat memberi masukan terhadap pengembangan peneliti-peneliti lainnya khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah guna memperbaiki implementasi penanggulangan kemiskinan di Aceh Tengah.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto(2002) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Kemudian T.R dan Allen V.E(thoha, 2005) menyatakan bahwa Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Peran ialah tingkah laku yang didapatkan berdasarkan suatu jabatan tertentu. Manusia disetiap kehidupannya pastilah memiliki peran dan fungsi ketika ia menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial. Manusia dalam menjalankan setiap perannya pastilah memiliki cara yang berbeda dari manusia lainnya yang tidak terlepas dari latarbelakang sosialnya. Ketika seorang manusia menjalankan hak dan juga kewajibannya dalam status dan kedudukannya, manusia tersebut sudah dapat dikatakan menjalankan suatu peran. (Soekanto Sulistyowati,2017:210- 211).

Orang-orang yang memiliki macam peran tergantung pada ;ingkup pergaulan dan juga lingkungan hidupnya, ia dapat menentukan setiap tindakan yang ingin diperbuatnya untuk masyarakat serta amanah dan juga kesempatan yang diberikan masyarakat untuknya. antara lain :

1. Peranan terdiri dari berbagai norma yang ditujukan pada posisi atau tempat orang tersebut di masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep yang digunakan oleh seseorang di masyarakat dalam organisasi.

3. Peranan disebut sebuah tindakan seseorang yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Selain daripada itu, Soerjono Soekanto (2000) juga menyatakan bahwa “Peranan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan prikelakuan”. Patokan-patokan perilaku ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat setempat dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap(2018) dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Kemudian peranan pemimpin juga didefinisikan oleh E. Winardi (2003) sebagai sesuatu yang mencakup kegiatan pemberian pengarahan dan koordinasi aktivitas-aktivitas pihak bawahannya. Hal tersebut mencakup kegiatan penempatan pegawai/karyawan (*italic*) hingga pemberian tugas-tugas.

Hasymi Ali (2002) mendefinisikan “Konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan (*italic*) tertentu”. menggambarkan perilaku yang diharapkan dari padanya jika ia menduduki suatu jabatan, baik dalam sistem masyarakat maupun dalam sistem organisasi.

Menurut Stephen P Robbins (2003) dunia ini sekedar panggung, dan semua pria dan wanita itu pemain. Dengan menggunakan kiasan tersebut bermakna masing-masing memainkan peran, yang dimaksud ialah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.

Kemudian John M. Ivancevich, Robert dan Michael T. Matteson, berpendapat peran meliputi:

Peran yang diharapkan (*expected role*) yaitu setiap jabatan dalam struktur kelompok memiliki peran yang menentukan perilaku yang diharapkan dari si pemegang jabatan.

Peran yang di persepsikan (*perceived role*) yaitu seperangkat perilaku yang dalam keyakinan seseorang harus ia lakukan karena posisinya.

Peran yang dijalankan (*perceived role*) yaitu perilaku yang benar-benar ia jalankan oleh orang tersebut.

Menurut Poerwadarminta (2002) peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok dalam suatu peristiwa, berdasarkan tersebut tindakan seseorang atau kelompok itu dalam menangani suatu peristiwa merupakan suatu tingkah laku di masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peranan dari Kemudian John M. Ivancevich, Robert dan Michael T. Matteson, berpendapat peran meliputi:

Peran yang diharapkan (*expected role*) yaitu setiap jabatan dalam struktur kelompok memiliki peran yang menentukan perilaku yang diharapkan dari si pemegang jabatan.

Peran yang di persepsikan (*perceived role*) yaitu seperangkat perilaku yang dalam keyakinan seseorang harus ia lakukan karena posisinya.

Peran yang dijalankan (*perceived role*) yaitu perilaku yang benar-benar ia jalankan oleh orang tersebut.

2.2. Pengertian Dinas Sosial

Dinas sosial atau Lembaga sosial adalah suatu lembaga yang didalamnya terdapat struktural atau pekerja pekerja sosial dan mempunyai keteraturan dalam

pemerintahan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Menurut Ramadhani, Sarbaini, dan Matnuh (2016: 99) dinas sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dibantu oleh pekerja sosial

Soelaiman Soemardi dalam buku Abdulsyani, menyatakan bahwa lembaga atau *social instution* sebagai “lembaga kemasyarakatan”. Kata lembaga dianggap tepat, oleh karena kecuali menunjukkan pada suatu bentuk, juga mengandung pengertian abstrak tentang adanya kaidah kaidah. Lembaga itu mempunyai tujuan untuk mengatur antara hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting. (Abdulsyani,2012: 7576)

2.3. Kemiskinan

2.3.1. Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda. (lukman ali, 660) kemudian Benyamin White mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah dengan wilayah lainnya (Dillon H.S dan Hermanto, 1993). Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar

tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1993)

Kemiskinan menurut Suparlan yang dikutip oleh Abu Ahmadi dalam bukunya Ilmu Sosial Dasar menyatakan bahwa kemiskinan adalah: “standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Prof. Emil Salim yang dimaksud dengan kemiskinan adalah: “suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Ahmadi, 2009)

Menurut Siswanto yang dikutip oleh Mawardi dalam bukunya IAD, ISD dan IBD mengidentifikasi kemiskinan sebagai kekurangan, terutama kekurangan sandang, pangan dan papan. Dengan kata lain, kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. (Hidayati, 2000)

Menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. (Arsyianti, 2017)

Menurut Ravallion, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak memiliki dana untuk berobat. Orang miskin umumnya

tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan, dan tidak memiliki rasa bebas. (Arsyad, 2016)

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. (2014)

Selanjutnya dikatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemampuan yang dimaksud disini bukan hanya kemampuan individu itu sendiri, tetapi juga dalam konteks keluarga, artinya meskipun kemiskinan merupakan atribut bagi individu yang bersangkutan tapi pada kenyataannya keadaan tersebut terkait erat dengan kondisi keluarga. Oleh karena itu kemiskinan penduduk dapat juga dikelompokkan menjadi penduduk atau individu miskin dan keluarga miskin.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan di pandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan sejumlah definisi di atas, dapat dibedakan konsep kemiskinan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tapi dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang beragam, sehingga alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan perlu menimbang faktor tersebut. Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

a. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. (<http://acehtengahkab.bps.go.id>)

b. Indeks Keparahhan Kemiskinan

Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. (<http://acehtengahkab.bps.go.id>)

2.3.2. Karakteristik kemiskinan

Masyarakat miskin sesuai karakteristiknya menurut Kasrtasmita (1993: 4), umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Sementara itu Soemardjan (dalam Sumodingrat 1999:81),

mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut: pertama, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kedua, kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Chamber (1995:109) mengemukakan lima karakteristik sebagai ketidak beruntungan (*disadvantages*) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain: (a) *proverty*, (b) *physical weakness*, (c) *isolation*, (d) *powerlessness*.

Moeljarto (1995: 98) mengemukakan tentang *proverty profile* sebagaimana berikut: masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain: (a) masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan. (b) kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi. (c) masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan social dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya. (d) kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. (e) tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar. (f) adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

Selanjutnya Supriatna (1997:82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin, antara lain:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri
2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah
4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas
5. Diantara mereka berusia relative muda dan tidak mempunyai

keterampilan atau pendidikan yang memadai

2.3.3. Pengentasan Kemiskinan

Menurut Soetatwo Hadiwiguno (Hamdar Arraiyyah, 2007: 4) kemiskinan adalah masalah yang kronis dan kompleks. Dalam menanggulangi kemiskinan permasalahan yang dihadapi bukan hanya terbatas pada hal hal yang menyangkut pemahaman sebab akibat timbulnya kemiskinan, melainkan juga melibatkan preferensi, nilai, dan politik. Kemudian menurut Nurhadi (2007: 40-41), dijelaskan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu (1) pendekatan peningkatan pendapatan, dan (2) pendekatan pengurangan beban. Kedua pendekatan tersebut ditopang oleh empat pilar utama, yaitu: (1) penciptaan kesempatan, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) peningkatan kemampuan, (4) perlindungan sosial. Kedua pendekatan dan keempat pilar tersebut bertumpu pada perencanaan, penganggaran APBN dan APBD serta perbankan/lembaga keuangan non bank, swasta dan masyarakat

Pilar pertama, yaitu perluasan kesempatan kerja dimaksudkan sebagai menciptakan suasana dan lingkungan ekonomi makro, pemerintahan, dan pelayanan politik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan mendukung upaya upaya penanggulangan kemiskinan. *Pilar kedua*, yaitu pemberdayaan masyarakat mengandung maksud bahwa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pematapan organisasi dan kelembagaan sosial. Politik, ekonomi, dan budaya sehingga mampu untuk mandiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin. *Pilar ketiga*, yaitu peningkatan/kemampuan human capital dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin baik individual/ kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar dan mampu mengadaptasi terhadap perkembangan lingkungannya. *Pilar keempat*, yaitu perlindungan sosial memiliki makna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan (*vulnerable*)

2.4. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengacu kepada penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk melihat dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan juga agar mengetahui persamaan dan perbedaannya.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dasril Arifin Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Syarif Kasim Pekanbaru (Skripsi)	Peran Dinas Sosial terhadap penanggulangan angka kemiskinan di Kabupaten Siak tahun 2013.	Penelitian ini memiliki persamaan peran yang digunakan yaitu peran Dinas Sosial kemudian penelitian ini juga menuju kepada penanggulangan angka kemiskinan yang sangat berkaitan dengan judul peneliti. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan dimana peneliti menggunakan indeks ini untuk meninjau seberapa dalam dan parah kemiskinan yang ada di Kab. Aceh Tengah.
Nur Mualifah Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Skripsi)	Dampak kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Bumi Raharjo Dalam Perspektif Islam tahun 2019.	Persamaan penelitian ini terdapat pada dampak yang diterima oleh masyarakat dikarenakan kemiskinan tersebut kemudian persamaan	Berdasarkan penelitian Nur Mualifah perbedaannya berdasarkan perspektif ekonomi islam dimana ada ukuran kemiskinan dapat dilihat berdasarkan

		<p>penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p>	<p>perspektif islam tersebut. Sedangkan penelitian yang di buat penulis aspek kemiskinan tersebut di tinjau dari indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan.</p>
<p>Ariska Suriyati Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Skripsi)</p>	<p>Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Makassar Tahun 2021.</p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu tentang peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pengetasan fakir miskin dimana konsep fakir miskin ini merupakan kemiskinan, yang setiap tahunnya kemiskinan tersebut terus meningkat. penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini yaitu tingkat kesulitan yang di tempuh oleh Dinas Sosial baik dari Makasar maupun dari Kab. Aceh Tengah dimana di Kota Makassar tingkat kesmikinannya lebih tinggi dan kemiskinan sudah melekat pada Kota tersebut dengan begitu Kota Makassar lebih sulit dalam</p>

			pengetasan kemiskinan yang setiap tahunnya meningkat.
--	--	--	---

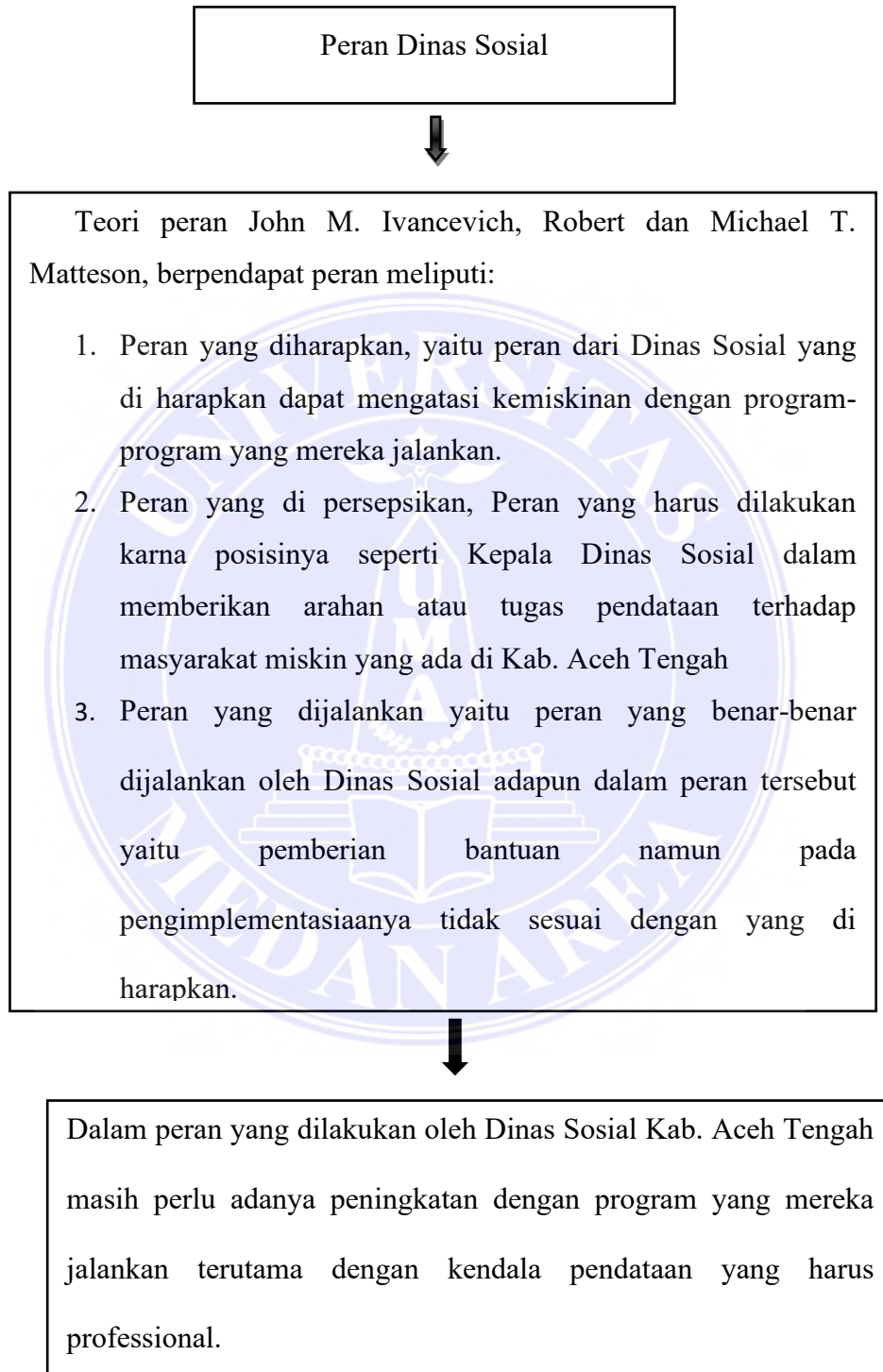
Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda walaupun penelitian yang diteliti dilakukan sama yakni tentang kemiskinan. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap peran Dinas Sosial dalam upaya pengetasan kemiskina yang di lihat dari indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan.

2.5. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur penelitian mengenai fokus penelitian yang akan dilaksanakan yaitu peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan ditinjau dari indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan dengan melihat Bagaimana peran dinas sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan Apa saja kendala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa ada beberapa kendala dalam pengetasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah karena implementasi yang tidak sesuai seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang.

Dalam penelitian ini saya menggunakan teori John M. Ivancevich, Robert dan Michael T. Matteson, menurut saya teori ini mampu memecahkan masalah pada rumusan masalah dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian, Sifat Penelitian dan Lokasi Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Bogdan dan Taylor dalam Meolong (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melihat kondisi subjek yang diteliti secara alamiah dan apa adanya. Peneliti melakukan pengamatan dari fenomena yang terjadi di Kab. Aceh Tengah dalam pengetasan kemiskinan.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Achmadi dan Narbuko (2004) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga mendapatkan data dan untuk di analisis.

Menurut Sugiyono (2016:13) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Kebijakan atas suatu masalah dapat menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat oleh karena itu peran serta pemerintah untuk memberikan implementasi dari suatu kebijakan, harus sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, untuk dapat memecahkan masalah-masalah terjadi di lapangan.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada Kantor Dinas Sosial jalan Mongal, Kec Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. 24471 24471.

3.2. Informan Penelitian

Informan menurut Arikunto (2013) adalah keseluruhan subjek penelitian. Informan sangatlah penting dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian ini bersifat deskriptif. Timbulnya suatu masalah tentu ada gejala dan cara untuk mengatasinya.

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Aulia Putra Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah yang sedang menjabat di dinas sosial Takengon, Kab. Aceh Tengah.
2. Informan utama adalah yang mengetahui secara teknis tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Rahmat Hidayat selaku Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah yang diharapkan bisa memberikan data atau berupa informasi tentang penelitian ini.
3. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dalam penelitian dan informan pendukung dalam hal ini adalah Staf Dinas Sosial Bapak Ahmad Dahlan.
4. Informan tambahan untuk penelitian ini adalah masyarakat yang menerima bantuan dari Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah yaitu Bapak Konadi Wan Perala
5. Informan tambahan selanjutnya yaitu masyarakat yang tidak menerima bantuan dari Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah yaitu Bapak Sukriandi, Ibu Halimah dan Bapak Hasyimi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumen.

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode penelitian pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah

proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2016:145). Teknik pengumpulan data dengan observasi (pengamatan) digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Agar dapat mengetahui peran Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan

b. Wawancara

Menurut Arikunto (2013: 155) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara pewawancara dan informan agar memperoleh data, keterangan, pandangan, serta pendapat dari respon agar diperoleh informasi yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dialog dengan informan sesuai dengan tujuan penelitian, seperti memberikan pertanyaan tentang peran pemerintah dalam Peran Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan ditinjau dari Indeks Keparahan dan Kedalaman kemiskinan dan banyak lagi yang sekiranya diperlukan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Segala yang dilakukan dalam penelitian ini, berupa

dokumentasi, sangat diperlukan untuk dapat memperjelas penelitian dan menjadi data penting bagi peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data dari dokumentasi, berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, surat kabar, majalah serta peraturan yang berkaitan dengan Peran Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan Dan Kedalaman Kemiskinan

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2016 :244).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi Kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2012) meliputi:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan adalah Peran Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan Dan Kedalaman Kemiskinan

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan. Banyaknya data yang di dapat dari lapangan akan dipilah-pilih sesuai dengan tujuan penelitian peranan Peran Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan Dan Kedalaman Kemiskinan untuk mendapatkan pemecahan masalah.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari tujuan penelitian peranan Peran Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan Dan Kedalaman Kemiskinan tentu mendapatkan hasil dari penelitan tersebut.

d. Kesimpulan Data

Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau vertifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau vertifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula

belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi. Dalam arti meninjau kembali data yang didapat dari penelitian Peran Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Ditinjau Dari Indeks Keparahan Dan Kedalaman Kemiskinan agar memperoleh kesimpulan dari jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

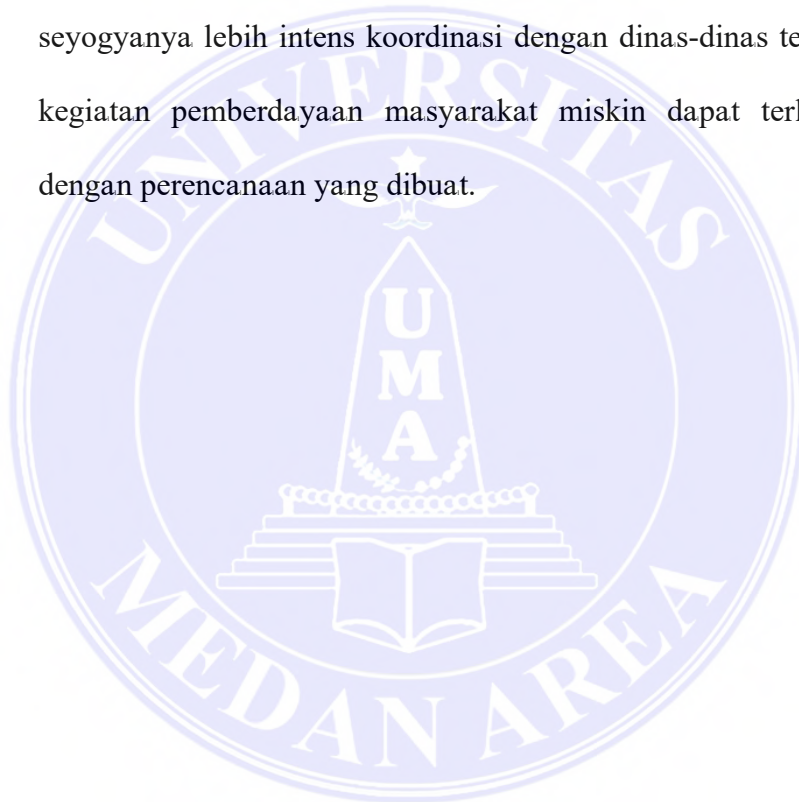
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut

1. Adapun peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah dalam pengentasan kemiskinan adalah melakukan beberapa tahapan-tahapan yang bertujuan untuk pengetasan masyarakat miskin yaitu: perencanaan, pendataan dan pemberian bantuan. Bentuk bantuan yang dilakukan Dinas sosial Aceh Tengah kepada masyarakat miskin yaitu: Bantuan Beras Miskin (RASKIN), Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun pada pengimplemntasiannya tidak sesuai dengan pendataan sebelumnya dimana masih banyak yang tidak menerima bantuan dan ada juga yang beberapa tahun terus mendapatkan bantuan tersebut.
2. Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Tengah adalah ketersediaannya anggaran. Faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Tengah adalah proses pendataan yang tidak professional dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

5.2. Saran

Dengan melihat pada hasil penelitian yang diperoleh, maka beberapa saran kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial antara lain:

1. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah merata dan menyeluruh kepada semua masyarakat miskin yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak membeda-bedakan.
2. Program-program RTLH yang telah direncanakan dan dilakukan perlu adanya sistem kontrol, pengawasan dan evaluasi secara baik.
3. Pemerintah Daerah dan dalam pemberdayaan masyarakat miskin seyogyanya lebih intens koordinasi dengan dinas-dinas terkait, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dibuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alchmaldi, Al. d. (2004). *metode penelitaln*. Jalkalrtal: Bumi Alksalral.
- Alhmaldi, Al. (2009). jalkalrtal: rinekal ciptal. *ilmu sosiall dalsalr*, 326.
- alhmdi, al. (1982). PT. binal ilmu. *psikologi sosiall*, 50.
- alli, h. (2002). jalkalrtal: bumi alksalral. *orgalnisalsi daln malnaljemen*.
- alpinus, j. (2018). *implementalsi kebijalkaln penalnggualngaln kemiskinalnaln di keluralhaln mujal-muju kecalmaltaln umbulhalrjo yogyalkalrtal*.
- Alrifin, D. (2013). *peraln dinaln sosiall terhalnalp penalnggualngaln alngkal kemiskinaln di kalbupalten sialk (studi kalsus di kecalmaltaln sei malndalu)*, 2.
- Alrsyald, L. (2016). Yogyalkalrtal: UPP STIM YKPM. *ekonomi pembalngunaln*, 299-300.
- Alrsyialnti, I. S. (2017). jalkalrtal: raljalwalli pers. *ekonomi pembalngunaln syalrialh*, 68.
- Dillon H.S daln Hermalnto. (1993). *Kemiskinaln di Negalral Berkemalng Malsallalh Krusiall Globall*. jalkalrtal:LP3ES: 10.
- grty. (54). *orhnbgcnbh*.
- Hidalyalti, M. d. (2000). balndung: pustalkal setial. *iald,isd,ibd*, 187.
<http://alcehtengalhhkalb.bps.go.id>. (n.d.).
- jalnalmalni, al. (2018). *implementalsi kebijalkaln penalnggualngaln kemiskinalnaln di keluralhaln mujal-muju kecalmaltaln umbulhalrjo yogyalkalrtal*, 1-2.
- lexy j, m. (2007). *metode penelitaln kuallitaltif*. Balndung: Remaldjal Kalryal.
- lukmaln alli, d. (660). *kalmus besalr balhalsal indonesial*. jalkalrtal: ballali pustalkal: edisi kedual , cetalkaln ketujuh.
- Miles, M. B. (2012). *Quallitaltif Daltal Alnallysis (terjemalhaln)*. jalkalrtal: UI-press.
- poerwaldalrmintal. (2002). jalkalrtal: PT:Ballali Pustalkal. *kalmus besalr balhalsal indonesial*.
- robbins, s. p. (2003). *perilalku orgalnisalsi*. jalkalrtal: jalkalrtal:indeks.
- soekalnto, s. (2000). jalkalrtal: PT.Raljal gralfindo persaldal. *pokok-pokok sosiologi hukum*.

- soekalnto, s. (2002). jalkalrtal, bumi alksalral. *teori peralnaln*, 243.
- sugiyono. (2016). *metode penelitaln kualntitaltif kuallitaltif daln R&D* . Balndung: Allfalbetal.
- Suhalrmi, Al. (2013). *prosedur penelitaln sualtu pendekaltaln praktik*. Jalkalrtal: PT. Rinekal Ciptal.
- Supalrlaln, P. (1993). *kemiskinaln di perkotalaln*. jalkalrtal: yalyalsaln obor indonesial.
- thohal, m. (2005). *perilalku orgalnivalsi*, 263.
- thohal, m. (2005). jalkalrtal: raljal gralfindo persaldal. *perilalku orgalnivalsi, konsep dalsaln daln alplikalsinyal*, 263.
- veithzall, r. (2004). *kepemimpinaln*. jalkalrtal: PT.Gralmedial universitals sumalteral utalral.
- winalrdi. (2003). jalkalrtal: peralnal medial. *malnaljemen perilalku orgalnivalsi*.
- Yusuf, N. C. (2014). jurnall ekonomi. *Pengalruh Tingkalt Kemiskinaln, Tingkalt Pengalngguraln, Upalh Minimum Kalbupalten/Kotal daln Lalju Pertumbuhaln Ekonomi Terhaldalp Indeks Pembalngunaln Malnusial Di Provinsi Rialu*, Volume 22, Nomor 2 Juni hall 2.

Rujukan artikel web

- (n.d.). Retrieved from <http://id.m.wikipedia.org>.
- <http://alcehtengalhhkalb.bps.go.id>. (n.d.).

LAMPIRAN

A. Pertanyaan umum

1. Apa perogram yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa-apa saja nama programnya?
3. Apakah semenja di bentuknya program dalam mencega angka kemiskinan memiliki kendala?
4. Apa- apa saya kendalahnya?

B. Pertanyaan khusus kepada kepalah Dinas

1. Apa saja yang menjadi kewenangan Keplah Dinas?

C. Pertanyaan Khusus kepada Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

1. Apakah ada pembinaan khusus untuk masyarakat Miskin?

D. Pertanyaa Khusus kepada Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.

1. Bagaimana cara mendata penduduk miskin apakah ada petuganya atau langsung didata oleh dinas sosial langsung?
2. Apakah penduduk miskin mempunyai golongan, kalau ada tergolong berapa golongan?

E. Pertanyaan Khusus Kepada Masyarakat

1. Apakah perogram pencega kemiskinan yang di buat oleh pemerintah
2. Bagaimkana pendapat saudara tentang Perohrang yang sedang di jalankan oleh Dinas sosial apakah berjalan dengan lancar?

DOKUMENTASI

Lampiran 1

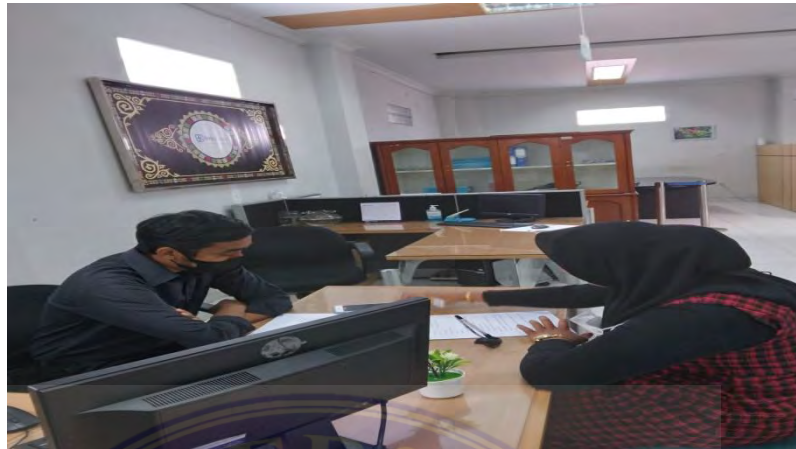


Dokumentasi dengan bapak kepala dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah pada Tanggal 13 April 2022 jam 10:00 Wib



Dokumentasi dengan Bapak Rahmat seksi pemerdayaan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah pada Tanggal 15 April 2022 jam 14:00 Wib





Dokumentasi dengan Bapak Dayat selaku Staf di Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah bagian seksi kesejahteraan masyarakat pada Tanggal 19 April 2022 jam 11:00 Wib



Wawancara dengan Masyarakat bersama dengan kampus Unsyiah yang ikut serta dalam meneliti kemiskinan di Aceh Tengah pada hari Rabu 11 Mei 2022 pada jam 14:00 Wib.